

EFEKTIVITAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SUBANG DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SUBANG

A Moeslihat Komara, Irsad Wiryanto, Rangga Dewantoro, Riki Rizki Maulana
Dosen Tetap Program Pascasarjana Universitas Subang
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Subang
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Subang
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Subang

amoeskomara@unsub.ac.id , irsad.wilyarto@gmail.com,
ranggapadewantoro27706@gmail.com rizkyfighter@aau.ac.id

Abstrak

Bencana Alam merupakan salah satu fenomena alam yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan bisa berupa kerugian materi maupun non materi Kabupaten Subang di wilayah utara memiliki karakter wilayah yang rentan terhadap bencana alam terutama bencana alam banjir. Pemerintah Kabupaten Subang telah menginisiasi pertemuan rutin FORKOMPIMDA dalam acara *coffee morning* yang diselenggarakan setiap minggunya satu kali, untuk koordinasi/ komunikasi dalam merencanakan dan merealisasikan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, Salah satu bentuk dari hasil Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Subang Adalah penanggulangan bencana di Kabupaten Subang tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah menganalisis Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanganan Banjir

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Jajaran Pimpinan Daerah dari FORKOPIMDA Kabupaten Subang, Kepala BPBD Petugas BPBD, Petugas Kesehatan, Petugas terkait dan Sukarelawan

hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya terkait dapat diketahui bahwa Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanganan Banjir dilihat dari Kejelasan tujuan, Filosofi dan sistem nilai,, Komposisi dan struktur, Teknologi organisasi dan Lingkungan organisasi, belum efektif dikarenakan dimensi teknologi organisasi, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir belum Efektif karena walaupun didukung oleh kompetensi anggota forum namun keterbatasan alat di lapangan menyebabkan penyaluran bantuan terhadap korban bencana menjadi terhambat.

Kata Kunci : Efektivitas Organisasi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Natural disaster is a natural phenomenon that threatens human survival. The negative impacts can be in the form of material or non-material losses. Subang Regency in the northern region has the character of an area that is vulnerable to natural disasters, especially floods. Subang District Government has initiated FORKOMPIMDA routine meetings in coffee morning events which are held once a week, for coordination/communication in planning and realizing programs to improve community welfare. One form of the results of the Regional Leadership Coordination Forum in Subang Regency is disaster management in Subang Regency, the research objective to be

achieved is to analyze the Effectiveness of the Subang District Leadership Coordination Forum in Flood Handling. The research method used in this study was descriptive qualitative. The informants in this study were Regional Leaders from FORKOPIMDA Subang Regency, Head of BPBD BPBD Officers, Health Officers, Relevant Officers and Volunteers

the results of the research and discussion of the previous chapter related to it can be seen that the Effectiveness of the Subang Regency Regional Leaders Coordination Forum in Flood Management seen from the clarity of objectives, philosophy and value system, composition and structure, organizational technology and organizational environment, has not been effective due to the dimensions of organizational technology, the effectiveness of the Forum The communication of Subang Regency Regional Leaders in flood management has not been effective because, although it is supported by the competence of forum members, the limited tools in the field have hampered the distribution of aid to disaster victims.

Keywords: Organizational Effectiveness, Regional Leadership Coordination Forum

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang Penelitian

Bencana Alam merupakan salah satu fenomena alam yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan bisa berupa kerugian materi maupun non materi. Tercatat total 1.441 kali bencana alam yang melanda Indonesia sejak 1 Januari-18 Juni 2021. Bencana alam yang terbanyak adalah banjir yakni 599 kejadian. Lalu puting beliung dengan 398 kejadian. Setelahnya ada tanah longsor dan kebakaran hutan yang masing-masing sebanyak 293 dan 109 kejadian. Sementara untuk bencana gempa bumi tercatat 20 kejadian. (BNPB, 2021).

Salah satu bencana alam yang dapat menimbulkan kerusakan besar yang mengancam sebagian wilayah Indonesia adalah bencana banjir. Bencana banjir dapat dipengaruhi oleh faktor alam, mulai dari curah hujan yang tidak terduga dan naiknya air laut pasang hingga banjir yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti permukiman DAS, permukiman bantaran sungai, penggundulan hutan dan pembuangan. Sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa bencana yang terjadi selama ini merupakan akibat dari ulah masyarakat sendiri dalam perusakan lingkungan

Masyarakat harus turut serta dalam membantu pelaksanaan 2 penanggulangan bencana tersebut agar dapat terhindar dari berbagai macam bencana yang dapat menyebabkan terhambatnya laju pembangunan. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi: 1) Kesiapsiagaan, 2) Peringatan dini, dan 3) Mitigasi bencana. Oleh sebab itu, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharap dapat semakin membaik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah jadi penanggung jawab pada usaha penanggulangan bencana. Secara rinci disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Subang di wilayah utara memiliki karakter wilayah yang rentan terhadap bencana alam terutama bencana alam banjir. Kabupaten Subang merupakan wilayah yang potensial di bidang pertanian dan perikanan. Banjir mengakibatkan genangan di lahan tambak dan sawah serta kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum

Tabel 1 Luasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Subang

Intensitas bencana banjir	Luasan (ha)	Persentase
Rawan Banjir	81715	27,27
Banjir	81715	27,27
Tidak Rawan Banjir	136190	45,45

Kurangnya area resapan akan menyebabkan tingginya proses sedimentasi di sepanjang aliran sungai sehingga proses pendangkalan akan cepat pula. Material Sedimen sungai (pasir dan lempung) biasanya terakumulasi pada area *meandering* sungai sehingga area ini biasanya mengalami akumulasi sedimen yang lebih banyak dibanding area sungai lainnya. Maka sangat penting untuk menjaga area *meandering* tetap memiliki lebar sungai yang cukup luas untuk mengakomodasi penumpukan sedimen tersebut. Ketika area *meandering* ini dijadikan area pemukiman, maka akan menambah sempit lebar zona *meander* sungai akibat tempat buangan sampah dan lainnya. Padahal area belokan sungai (*meandering*) merupakan area potensial terjadinya luapan sungai ketikan volume dan debit air melebihi kapasitas sungai, maka tidak heran pemukiman di sekitar area *meandering* akan mengalami kebanjiran. Tipe sungai di Kab. Subang bagian utara ini sebagian besar bertipe *dendritik*, sehingga akan banyak zona pertemuan 2 aliran sungai (*junction*) yang juga merupakan area potensi luapan Sungai

Potensi bencana yang besar di Subang jelas membutuhkan penanganan yang serius dari segala komponen masyarakat dan pemerintah. Subang dihadapkan pada bahaya alam yang bervariasi dan membutuhkan penanganan dari semua lembaga terkait dan juga masyarakat. Namun dari beberapa bencana yang terjadi, dan dari pengamatan yang sederhana, seperti tidak terlihat koordinasi masif antar institusi yang memang punya tanggung jawab respon terhadap bencana. Ada kemungkinan tidak

terjadi adanya koordinasi satu atap terhadap penanganan bencana di Subang, khususnya pada respon darurat. Maka dari itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana koordinasi komunikasi antar institusi dalam penanganan bencana di Subang. Tujuannya adalah untuk melihat koordinasi setiap institusi dalam penanganan bencana di Subang. Manfaat penelitian ini menjadi masukan terhadap upaya komunikasi koordinasi institusi penanganan bencana di Subang.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk suatu wadah yang disebut dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA. Hal yang sering menjadi persoalan adalah komunikasi, informasi, koordinasi dan kerja sama (Budi, 2012). Karena dalam penanganan bencana entah dalam kondisi darurat, mitigasi maupun kesiapsiagaan, semua tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada kerja sama setiap elemen masyarakat dalam tanggap bencana maupun penanggulangan bencana

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanganan Banjir?

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas ialah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat atas pencapaian sebuah tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan yang telah tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya terhadap keluaran yang dihasilkan (Handoko, 2001:7).

The Gie dalam Halim (2004:166), berpendapat bahwa efektivitas yaitu suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki jika seseorang

melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Pandangan dari segi efektivitas organisasi menurut Tampubolon (2008:173) adalah terdiri atas efektivitas setiap orang dan kelompok. Pada tingkat yang paling dasar dalam suatu organisasi terletak pada efektivitas individu. Pandangan ini menekankan pada kinerja individu-individu yang ada di dalam organisasi. Pada pandangan efektivitas kelompok, penekanannya adalah pada kinerja yang bisa diberikan kepada kelompok pekerja karena di samping bekerja sendiri, pada kenyataannya individu biasanya juga bekerja bersama-sama di dalam kelompok

Faktor ekstern ada yang dapat dikontrol (*controlable*), ada pula yang tidak dapat dikontrol (*uncontrolable*). Faktor yang tidak dapat dikontrol jauh lebih berpengaruh daripada faktor yang dapat dikontrol, karena terkadang faktor yang tidak dapat dikontrol akan menyulitkan organisasi dalam mengambil kebijakan dan penyusunan strategi untuk mencapai tujuan

Steers (dalam Purnomo, 2006; 37-40) berpendapat terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu karakteristik/ciri organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, dan kebijakan/praktik manajemen. Berikut penjelasannya:

a) Karakteristik organisasi, merupakan hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam struktur organisasi. Dalam struktur organisasi, karyawan ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

b) Karakteristik lingkungan. Karakteristik ini mencakup:

- 1) Lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, khususnya terkait dalam pembuatan keputusan dan pengambilan Tindakan
- 2) Lingkungan intern yaitu lingkungan yang secara keseluruhan berada di dalam organisasi yang dikenal dengan iklim organisasi.

c) Karakteristik pekerja, merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Masing-masing individu memiliki banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu menjadi penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

d) Karakteristik manajemen, merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua hal yang ada di dalam organisasi guna mencapai efektivitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni desain yang memberikan kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Subang dalam penanggulangan bencana banjir. Dalam suatu kurun waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian.

Digunakannya metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Subang dalam penanggulangan bencana banjir, suatu kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

HASIL PENELITIAN

1) Kejelasan

Forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Subang lahir dari Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Instansi Vertikal adalah perangkat dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi Vertikal Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang- bidang ketenteraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah

Namun Peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mengatur terkait Tugas Pokok dan Fungsi dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang belum ada. Hal ini menunjukkan belum adanya tujuan organisasi secara formal dari forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten subang. teori (Steers, 1980) yaitu tujuan organisasi harus ditetapkan secara formal dan dirumuskan secara tertulis agar dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh anggota

2) Filosofi Sistem Nilai

Dalam praktiknya, filosofi organisasi sering diwujudkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Secara historis, pada masa pemerintahan orde baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, wadah yang hampir sama dengan FORKOPIMDA adalah Musyawarah Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan MUSPIDA. Keberadaan MUSPIDA ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA). Landasan filosofis dari terbentuknya Forkopimda adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah, namun tidak terdapat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana alam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang, secara merupakan fungsi dari pelaksanaan koordinasi sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

3) Komposisi dan struktur

Menurut Steers dalam Irawati (2013) Komposisi menunjukkan adanya latar belakang (tingkat pendidikan, tingkat kemampuan intelektual, ciri-ciri kepribadian, dan motivasi) dari anggota organisasi atau kualifikasi yang diperhatikan sejalan dengan peranan, tugas, dan fungsi serta aktivitas pencapaian tujuan. Sedangkan struktur organisasi mengacu pada bagaimana organisasi mengatur dirinya, dengan membagi tugas dan peranan secara baik, penetapan uraian tugas secara lengkap serta jelas, dan adanya pengaturan kewenangan oleh unsur pimpinan secara jelas, sehingga mampu menggambarkan kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi

Menurut Rahyunir Rauf (2016;142-143), bahwa; “Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing, dan dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan dari instansi vertikal di wilayahnya masing-masing”. Sehubungan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut di daerah dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), seperti dinyatakan pada Pasal 26 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni; “Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten/Kota, dan FORKOPIM Kecamatan. FORKOPIMDA Provinsi diketuai oleh Gubernur, FORKOPIMDA Kabupaten diketuai oleh Bupati, dan FORKOPIMDA Kota diketuai oleh Walikota serta FORKOPIM Kecamatan diketuai oleh Camat. Anggota FORKOPIMDA daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas; 1. Pimpinan DPRD 2. Pimpinan Kepolisian 3. Pimpinan Kejaksaan 4. Pimpinan Satuan Teritorial TNI

4) Lingkungan organisasi

Lingkungan di sini merupakan kondisi lingkungan/suasana kerja di dalam organisasi yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan hubungan yang harmonis bagi karyawan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan fisik, seperti tingkat kebisingan, tata letak ruang kerja, penataan warna, dan penataan ruang dalam maupun luar ruangan. Lingkungan organisasi yang memadai akan mempengaruhi keefektifitasan organisasi. Pertemuan pimpinan daerah di Kabupaten Subang biasanya dilakukan minimal satu bulan sekali, dan dilakukan di tempat yang sudah dijadwalkan dan umumnya di pendopo Kabupaten Subang

Karakteristik Lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi

KESIMPULAN

1) Dimensi kejelasan tujuan, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena bentuk dari tujuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir adalah Peraturan Daerah No. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Subang

- 2) Dari dimensi filosofi system nilai, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena telah sesuai dengan landasan filosofis dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah pasal 25
- 3) Dari dimensi komposisi dan struktur, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena telah memiliki SOP yang jelas dalam penanggulangan bencana
- 4) Dari dimensi teknologi organisasi, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir belum Efektif karena walaupun didukung oleh kompetensi anggota forum namun keterbatasan alat di lapangan menyebabkan penyaluran bantuan terhadap korban bencana menjadi terhambat.
- 5) dimensi lingkungan organisasi, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena telah didukung lingkungan internal yaitu adanya kesadaran dari para pimpinan daerah dan eksternal yakni telah diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

SARAN

- 1) Pemerintah dalam hal ini Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang, agar tetap konsisten menjaga prinsip badan penanggulangan

bencana dan untuk pemerintah pusat maupun daerah diharapkan memberikan perhatian lebih dan mendukung penuh segala kegiatan penanggulangan bencana agar semua rencana kegiatan yang telah dibuat dapat terealisasi semua

- 2) Perlunya pemerataan pelatihan dan sosialisasi kepada setiap perwakilan dari masing-masing desa yang ada di Kabupaten Subang terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana sebagai bentuk dari pelaksanaan program Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Gie, The Liang .1998. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T Hani. 2001. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia Edisi Kedua*.BPFE. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Indrajid, T. R. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Organisasi pada Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat*. Naskah Publikasi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Irawati, N. (2013). *Hubungan Kualitas Pegawai dengan Efektivitas Organisasi di Biro Humas dan Protokol Sekertariat Dearah Provinsi Kepulauan Riau*. Naskah Publikasi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Mohyi, Ach. (1999). *Teori dan Perilaku Organisasi*. Malang: UMMPress.
- Muhammad tahun 2020 tentang Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam membangun ketertiban dan keamanan masyarakat (Studi di Kabupaten Sekadau)
- Purnomo, A. J. (2006). *Analisis Efektivitas Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Dipongoro Semarang.
- Purwanto, Djoko. (2003). *Komunikasi Edisi Kedua*. Erlangga. Jakarta.
- Ridwan, dan Akdon. (2006). *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian Untuk Administrasi dan Manajemen*. Dewa Ruci: Bandung.
- Rofai, A. (2006). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Dipongoro Semarang.
- Ruslan, Rosady. (2008). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Supriyono. (2000). *Perencanaan dan Pengendalian Serta Pembuatan Keputusan*.BPFE. Yogyakarta.
- Tampubolon, Manahan P. (2008). *Perilaku Keorganisasian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta.